
KINERJA DINAS SOSIAL DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG

Yuyun Yuliana^a, Isabella^b, Doris Febriyanti^c

^{a,b,c} Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia
Email: 2018610064/@students.uigm.ac.id

ABSTRAK

Kinerja dinas sosial dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di kota Palembang cukup baik karena adanya penurunan jumlah anak jalanan. Isu ini, yang cukup penting dari perspektif kesejahteraan sosial, muncul dalam kasus penitipan anak jalanan, di mana di sebagian besar wilayah jumlah anak jalanan semakin meningkat. Masyarakat dalam lingkungan kemiskinan lah sebagai penyebab utama munculnya anak jalanan. Perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin mencemaskan, hingga menjadi masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera. Hal tersebut disebabkan oleh situasi krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di kota besar. Fenomena ini mudah terlihat di persimpangan atau di lampu merah dan halte bus. Jumlah anak jalanan terus bertambah dan bertambah, meskipun ada upaya, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk mengurangi jumlah anak yang hidup di jalanan. Khususnya Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggunakan wawancara, dokumen dan diukur melalui teori kinerja petugas dinas sosial kota Palembang periode 2020-2021, dengan hasil kinerja dinas sosial dalam menangani anak jalanan karena anak selalu turun jalan.

Kata Kunci: Kinerja, Dinas Sosial, Anak Jalanan

THE PERFORMANCE OF SOCIAL SERVICES IN IMPLEMENTING STREET CHILD DEVELOPMENT PROGRAMS In PALEMBANG CITY

ABSTRACT

The performance of the Social Service in implementing the street children development program in the city of Palembang is quite good due to the decreasing number of street children taking to the streets. It is the society in the circle of poverty as the main cause of the emergence of street children. The recent development of the number of street children is getting more and more worrisome, to the point that it becomes a social problem that requires an immediate solution. This is caused by the situation of the economic crisis and over-urbanization in big cities. We can easily find this phenomenon at crossroads or red lights, and bus stops. The number of street children continues to grow and develop, even though quite a lot of efforts have been made, both by the government and non-governmental organizations (NGOs), to reduce the number of children living on the streets. Especially the city of Palembang. This study uses a descriptive qualitative method, using interviews, documentation and measured through the theory of employee performance at the Palembang City Social Service in 2020-2021 with the result that the performance of the Social Service is not good in dealing with street children because street children are still down in line.

Keywords: Performance, Social service, Street children

* Corresponding Author. Tel: Yuyun Yuliana
E-mail: 2018610064/@students.uigm.ac.id

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan di Kota Palembang. Porter dan Lawler mengatakan bahwa kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya (Porter dan Lawler 1967). Kinerja merupakan gambaran ambang pencapaian dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai visi dan misi (Maya Ramadhani R, dalam Isabella et al. 2020).

Selanjutnya menurut Rezkia Raisa Dora, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dilakukan oleh pegawai suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi (Rezkia Reisa Dora). 2018). Omnibus law adalah seperangkat penyederhanaan perizinan, persyaratan, persyaratan investasi pekerjaan, dan fasilitas pemberdayaan (Sanny Nofrima et al., 2021). Akhir-akhir ini isu yang cukup mendesak dari segi perlindungan sosial adalah pengasuhan anak jalanan, dimana di sebagian besar daerah jumlah anak jalanan semakin meningkat.

Namun, perhatikan bagian penduduk yang saat ini berada dalam lingkaran kemiskinan yang menjadi penyebab utama munculnya anak jalanan. Peningkatan jumlah anak jalanan belakangan ini semakin mengkhawatirkan, menjadi masalah sosial yang serius sehingga sangatlah membutuhkan pemecahan secepatnya. Hal tersebut disebabkan akibat situasi darurat ekonomi dan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di kota besar. Insiden ini dapat dengan mudah ditemukan di persimpangan atau di lampu merah, halte bus. Jumlah anak jalanan terus bertambah dan bertambah, meskipun ada upaya pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengurangi jumlah anak yang tumbuh di jalanan (Suyanto, 2016). : 196 -197).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas

dan tegas mengatur kewajiban negara untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar meskipun mereka berada di bawah tanggung jawab pemerintah, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945, Artinya pemerintah bertanggung jawab penuh atas pembinaan dan pemberdayaan atau perkembangan anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk program untuk kepentingan anak-anak yang merasa tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain sehingga bisa memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan, dan perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraannya. Anak juga berhak atas harapan dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri dan kemampuannya. Tak seluruh keluarga bisa memenuhi semua hak dan kebutuhan anak, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan ekonomi.

Pada ambang nasional, Pemerintah Pusat telah mengatur terkait kesejahteraan anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1.

1. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
2. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara

untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Dalam rangka melaksanakan tugas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan untuk mengatur perkembangan anak jalanan, anak jalanan, dan pengemis. Pemerintah daerah khususnya di beberapa daerah, termasuk kota-kota besar, dimana masalah sosial yang berkaitan dengan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah penting yang perlu segera ditangani. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang bisa bersaing dalam penyelenggaraan tersebut. (Doris Febriyanti dkk, 2017).

Kota Palembang salah satu kota besar di Indonesia memiliki permasalahan sosial terkait anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Selama tahun 2021 -2019, jumlah anak jalanan di Kota Palembang mencapai puncaknya pada tahun 2015 (Dinas Kota Palembang, 2020). Meski pada tahun berikutnya jumlah anak jalanan mengalami penurunan.

Pemerintah Kota Palembang menangani permasalahan sosial yang dihadapi anak jalanan melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas sosial untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang normal, baik fisik maupun mental, Tuhan dan masyarakat. Pembinaan dilakukan secara lebih variatif, dimana melalui pedagogi yang berbobot dalam segala aspeknya, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial sebagai penegak Peraturan Kota

Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang orientasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Berusaha memberikan nasehat kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Wilayah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, disebutkan bahwa “dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, pemerintah kota berwenang melakukan, upaya terpadu dan berkelanjutan, antara lain: Perlindungan sosial;

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Pemberdayaan sosial, dan
- c. Jaminan sosial”.

Dalam hal perlindungan sosial bagi anak jalanan, induksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, unit teknis daerah terkait dan aktor lainnya. Berdasarkan data Rangkuman Kesadaran Dinas Sosial Kota Palembang (Dinas Kota Palembang, 2020), jumlah anak jalanan sebanyak 66 anak yang terdiri dari 1 anak laki-laki dan 25 anak perempuan.

Outcome dari sosialisasi tersebut dilakukan secara terpadu sesuai dengan standar operasional prosedur yang dimasukkan ke dalam hunian sementara dan/atau permanen, khususnya UPTD panti sosial di lingkungan bakti sosial. DPRD Kota Palembang Tahun 2013 12 tentang pengenalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal itu kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 7 peraturan walikota Palembang nomor 17 tahun 2014.

Untuk tata cara penerimaan dan orientasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, data yang diperoleh dari kegiatan penerimaan dan orientasi tersebut selanjutnya akan dikelola oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial mengasuh anak jalanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang rujukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis,

mempunyai program sebagai berikut: perlindungan sosial masyarakat, rehabilitasi sosial, peningkatan status sosial dan keamanan sosial.

Selain itu, upaya pencegahan juga harus dipimpin oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jumlah dan kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh anak jalanan. Namun dalam perkembangannya, perkembangan anak jalanan yang dicapai Dinas Sosial masih jauh dari sempurna. Hasil penelitian dilakukan oleh Riva Anisa mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan judul “Mengevaluasi Kebijakan Pembangunan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kota Palembang”.

Organisasi UPTD yaitu Yayasan Rehabilitasi Anak Nusantara Panti tidak melakukan kegiatan rehabilitasi sosial atau pemberdayaan sosial. Sementara itu, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial harus dilakukan untuk mengurangi jumlah anak jalanan. (Riva Anisa, 2021) Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas bakti sosial dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan yang dipimpin oleh dinas sosial. Pelaksanaan DPRD Kota Palembang dan solusi mengatasi kendala dan kendala tersebut bahwa dinas sosial kota Palembang berpengalaman dalam menerima anak jalanan di kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan empiris, yaitu jenis penelitian sosiologis dan bisa juga disebut kerja lapangan, yaitu tinjauan faktual terhadap hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 2006:122). Oleh karena itu, penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan

untuk mempertimbangkan keadaan objek alamiah (sebagai lawan dari eksperimen).

Dengan kata lain, peneliti adalah alat kunci, teknik pengumpulan data adalah triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada signifikansi daripada generalisasi (Soekanto, 2006:122). Lebih jauh, penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data langsung tentang pola perkembangan pelayanan sosial dalam pengasuhan anak jalanan di kota Palembang.

Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan dan kendala yang perlu diatasi oleh anak jalanan di kota Palembang guna menawarkan solusi bagi dinas sosial dalam melaksanakan pekerjaan terhadap anak jalanan. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat memahami dan menjelaskan secara penuh arti dari kata-kata yang terlibat. Sebagai studi kasus, penelitian ini juga ingin mendeskripsikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi sosial.

Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data primer yang diperlukan untuk penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber atau lokasi subjek penelitian, atau kumpulan data penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Suharsini Arikunto, data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya melalui wawancara, tindak lanjut dan sejenisnya (Arikunto, Proses Penelitian: Pendekatan Praktis, 2013: 171). Dengan kata lain, itu adalah sumber data yang diambil langsung dari asalnya. Data kunci untuk

penelitian ini diperoleh dari Dinas Sosial Kota Palembang;

- 1) Anak Jalanan yang berada di Dinas Sosial Kota Palembang.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Kota Palembang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah informasi tertentu yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono, sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca, meneliti, dan belajar melalui sarana lain dari literatur, buku, dan dokumen (Sugiyono, Exploring Qualitative Research, 2012:1 1). Data ini diperoleh dengan mengutip sumber lain seperti, Buku-buku, yang berkaitan dengan judul skripsi, Internet dan lain-lain.

Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data itu berasal. Menurut Suharsimi dalam (Arikunto, Manajemen Riset, 2009:87), sumber data yang disebutkan dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data untuk penelitian ini meliputi: a. anak jalanan dibina di Dinas Sosial Kota Palembang, b. Dinas Sosial Kota Palembang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Palembang

Keberadaan anak jalanan di perkotaan merupakan salah satu permasalahan klasik yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kota Palembang, pemerintah kota Palembang melalui dinas sosial yang melaksanakan perda tersebut. anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk keperluan pembinaan anak jalanan yang membutuhkan, hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara dengan

ketua kelompok anak mengembara sebagai berikut:

“Kinerja dari Dinas Sosial ya bagus-bagus saja karena terbukti sudah banyak anak jalanan yang kami jangkau dan bina sehingga juga mengurangi populasi anak jalanan di Kota Palembang tapi masih ada saja anak jalanan yang turun kembali kejalanan dan itu masih sulit untuk kami atasi karena anak jalanan nya yang bandel susah untuk di kasih arahan”

Untuk mengetahui kinerja dinas sosial kota Palembang dalam menerima anak jalanan digunakan tiga indikator teori kinerja yaitu penyelenggaraan kegiatan yang berbeda dan pengerahan pegawai organisasi untuk mencapai tujuannya. mencapai, mengelola karyawan organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. mencapai efisiensi yang tinggi dan memperlancar organisasi, serta adanya sistem penghargaan dan hukuman untuk mendukung suasana kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

a. Mengorganisasikan Berbagai Kegiatan Dan Memobilisasi Para Pegawai Yang Ada Dalam Organisasi Agar Tujuan Organisasi Dapat Tercapai.

Menyelenggarakan berbagai kegiatan dan menggerakkan staf untuk mencapai tujuan organisasi merupakan langkah yang dilakukan oleh dinas sosial kota Palembang dengan melaksanakan sosialisasi laporan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Dzul selaku kasi anak jalanan yang menyatakan bahwa:

“Ya kalo laporan ya kita setiap kali mengadakan patroli rutin itu bukannya laporan sih sebenarnya tapi kegiatan rutin kita untuk mengatasi/meminimalisir anak jalanan yang berkembang dengan pesat yang bisa mengganggu masyarakat khususnya di jalan-jalan protokol. Hanya laporan penjangkauan anak jalanan saja ya bukan laporan kalo anak jalanan tidak kembali ke jalan”.

Dalam koordinasi kegiatan Dinas Sosial khususnya dalam pengasuhan anak jalanan di kota Palembang terdapat laporan hasil induksi anak jalanan yang dibuktikan dengan kegiatan mobilisasi kegiatan atas dasar laporan yang dibuat disetiap kegiatan. Namun, yang ada hanya laporan anak-anak

yang mendekati anak jalanan saat patroli, bukan laporan anak jalanan yang tidak kembali ke jalan. Hasil hasutan yang melibatkan kegiatan persahabatan, razia, dan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang untuk mengatasi masalah anak jalanan dilaporkan. Misalnya, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibuat untuk mendata anak jalanan yang tertangkap razia.

Fungsi utama BAP sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penyidikan, pembelaan, pembuktian kongkrit, dan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya, BAP yang dilakukan Dinas Sosial dengan anak jalanan merupakan hasil pemeriksaan lisan terhadap suatu perkara pidana. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan penanganan sasaran, capaian dan kinerja masyarakat kurang mampu (PMKS) periode 2020-2021. Indeks Persen Pelayanan Sosial Kota Palembang pada tahun 2020 dalam merawat anak terlantar, gelandangan dan pengemis dengan tingkat penyelesaian 80% melampaui item yang ditetapkan target yaitu 65%, dan 65% tercapai.

Pencapaian pada tahun 2020 ini sama dengan target usaha dan tingkat penyelesaian pada tahun 2021, yaitu target penyelesaian 65% dan 65%. Dengan capaian tersebut, tujuan akhir periode Renstra belum tercapai. Tidak hanya itu, upaya pengorganisasian dan pengerahan pegawai untuk dapat mencapai tujuan organisasi juga dilakukan dengan kemampuan organisasi dalam melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepada organisasi guna mencapai tujuan organisasi. tujuan, misi dan visi organisasi. Pada tahun SM. Manajemen Sumber Daya Manusia

b. Mengelola Para Pegawai Organisasi Secara Efektif Agar Tujuan Organisasi Dapat Tercapai Disertai Efisiensi Yang Tinggi

Sebagai upaya dalam mengelola para pegawai organisasi secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai disertai efisiensi

yang tinggi dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan. Dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Dinas Sosial Kota Palembang pada tabel dibawah ini:

Di Dinas Sosial Kota Palembang terdapat 82 PNS dan non PNS, 21 PNS ditempatkan pada dinas yang sesuai dengan pendidikannya dan 17 PNS ditempatkan pada dinas yang tidak sesuai dengan dinas pendidikannya. Sedangkan untuk pegawai non-PNSD, 26 pegawai non-PNSD ditempatkan pada jurusan berdasarkan jurusan pendidikannya, dan 18 pegawai non-PNSD ditempatkan pada jurusan yang tidak sesuai dengan bidang pendidikannya.

Kinerja Departemen Sosial yang melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan memperhatikan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia adalah mendefinisikan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Misalnya dengan rekrutmen staf, seleksi dan rekrutmen untuk posisi yang diminta. Di Dinas Sosial Kota Palembang merekalah yang mengatur rekrutmen sebelum diangkat menjadi staf.

Seperti diketahui, jumlah PNS sebanyak delapan puluh dua orang, terdiri dari tiga puluh delapan PNS dan empat puluh empat PNS. Secara khusus, ada tujuh belas pekerja dalam kategori reintegrasi sosial. Meskipun ada pegawai yang ditempatkan pada departemen yang tidak sesuai dengan jurusan pelatihannya, pegawai tersebut telah dilatih untuk menyesuaikan dan melatih kemampuannya agar tidak mempengaruhi efektifitasnya. Kedua, ada penilaian kinerja, pengembangan karir.

Proses ini dilakukan setelah pegawai bekerja di dinas sosial kota Palembang. Tidak hanya mengevaluasi secara positif tetapi juga menganalisis jika kinerja karyawan tersebut negatif. Hal ini ditunjukkan dengan evaluasi kinerja karyawan untuk mengetahui sejauh mana penghargaan yang diberikan kepada karyawan tersebut atas kinerjanya dapat digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan karir. Tinjauan kinerja karyawan ini untuk mengetahui sejauh mana penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan karir.

Seperti kecepatan dan kualitas kinerja pegawai. Dalam pengembangan karir, ada beberapa program, antara lain pelatihan dan promosi. Dibuat untuk mengubah status, jabatan, atau posisi karyawan dengan tujuan menciptakan peluang pengembangan yang sesuai. Di lingkungan Departemen Sosial sendiri, evaluasi kinerja sangat penting dalam menilai kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan mereka, dapat menentukan penghargaan apa yang pantas untuk diberikan kepada mereka, dapat menggunakannya sebagai dorongan untuk memajukan karir mereka.

Pegawai dinas sosial kota Palembang juga banyak yang bekerja dengan kualitas dan tepat waktu untuk mendapatkan reward yaitu kenaikan pangkat. Ketiga, pelatihan dan pengembangan, dalam prosesnya, departemen sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, seminar serta kesempatan untuk berkoordinasi dalam perusahaan dengan perencanaan karir karyawan. Staf. Pelatihan dan pengembangan ini mencakup kegiatan seperti desain dan implementasi program pelatihan dan program penilaiannya. Upaya yang dilakukan berupa pengembangan manajemen, perbaikan sistem kerja dan upaya alih teknologi, baik yang bersifat medium maupun high-tech.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Palembang juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia meningkat atau tidak, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan individu yang berkualitas diperlukan pelatihan yang berkualitas. Sedangkan Dinas Sosial Kota Palembang mengadakan kursus-kursus pelatihan untuk melatih keterampilan pegawai dan mengembangkan sumber daya manusia agar pegawai menjadi lebih baik dan terampil, tidak hanya itu Dinas Sosial Kota Palembang juga rutin menyelenggarakan seminar yang bertujuan untuk membantu para pekerja dinas sosial Kota Palembang untuk menambah lebih banyak pengetahuan dan wawasan.

Pengembangan karir adalah peningkatan atau peningkatan prestasi kerja, perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia merupakan kelanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja, pada dasarnya untuk menjamin dan mempertahankan tenaga kerja yang ada selalu dengan kualifikasi yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. Berencana.

c. Menciptakan Kondisi Organisasi, Sistem Balas Jasa dan Hukuman Untuk Menunjang Suasana Kerja Agar Tercapai Tujuan Organisasi Yang Sudah Ditetapkan

Dalam menciptakan kondisi organisasi, sistem kompensasi dan hukuman untuk mendukung suasana kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dilakukan dalam dua tahap, di mana yang pertama, Sanksi bagi karyawan yang tidak menyelesaikan tugasnya. misi. Sanksi/penalti bagi PNS Palembang yang tidak kompeten sangat berat yaitu pengurangan gaji atau pemberian SP1-SP3.

Jika Anda mendapatkan SP3, Anda akan diberhentikan/dipecah. Di dinas sosial

kota Palembang, sudah ada beberapa pegawai yang menerima SP3/diberhentikan karena tidak masuk kerja lebih dari tiga hari tanpa memberi kabar/otorisasi. Oleh karena itu, kami berharap para petugas dinas sosial kota Palembang lebih berkualitas agar hal yang sama tidak terjadi, karena sangat disayangkan jika mereka dipecat karena cukup sulit untuk menjadi pegawai dinas. dari Palembang.

Kedua, adanya penghargaan bagi pegawai yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena di dinas sosial kota Palembang sendiri, jika kinerjanya bagus dan mumpuni maka mereka akan mendapatkan kenaikan gaji. Selain itu, motivasi selalu ditransmisikan agar pegawai selalu bersemangat dalam menjalankan tugas kedinasan. Harus ada penghargaan bagi karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini merupakan bentuk pembayaran tenaga kerja sosial kota Palembang bagi pekerja yang menjalankan tugasnya dengan baik.

Tentang remunerasi/penghargaan, harus ada koordinasi yang baik antara departemen sumber daya manusia dan manajer. Manajer bertanggung jawab untuk menaikkan gaji, sedangkan departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. Sistem kompensasi membutuhkan keseimbangan antara pembayaran dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja. Pembayaran meliputi gaji, bonus, insentif dan bagi hasil yang diterima oleh karyawan.

Manfaatnya antara lain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan, dan lainnya. Departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa gaji yang ditawarkan kompetitif di antara perusahaan sejenis, adil dan sesuai. hukum yang berlaku (misalnya UMR) dan berikan alasannya. Penghargaan atau award dapat berupa penghargaan atas potensi karyawan yang dapat memberikan pengaruh positif.

Sedangkan punishment adalah ancaman hukuman dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai pelaku, memelihara peraturan yang berlaku dan mendidik pelaku.

d. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan Di Kota Palembang

Keberadaan anak jalanan di Kota Palembang menjadi perhatian serius Dinas Sosial Kota Palembang. Sebagai bentuk perhatian dinas sosial kota Palembang adalah dengan mengadakan pelatihan. Namun, masalah muncul ketika anak asuh kembali turun ke jalan. Padahal, anak jalanan menginginkan kehidupan normal seperti orang lain. Mereka juga memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Namun, tekanan ekonomi memaksa mereka untuk kembali turun ke jalan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempersulit pengendalian anak jalanan di kota Palembang. Sulitnya menangani anak jalanan pemberontak merupakan kendala yang sulit bagi Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan.

Mereka yang cenderung kembali ke jalanan adalah mereka yang harus memenuhi segala kebutuhannya karena jika tidak kembali ke jalanan, mereka akan bingung mencari makan. Jadi pemberontakan adalah cara untuk membuat mereka tetap hidup. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Palembang adalah anak jalanan yang sulit dikendalikan, yang sering kabur bahkan kembali ke jalan ketika Dinas Sosial Kota Palembang sudah menguasainya.

Kembalinya anak-anak ke jalanan bahkan ketika pelatihan telah diadakan telah menimbulkan masalah terkait perkembangan dinas sosial Palembang. Karena pelatihan harus mencakup empat unsur: Pertama, tindakan menuju hal yang lebih baik. Ini tidak berlaku untuk anak-anak yang kembali ke jalan bahkan setelah mereka dibawa masuk. Alasannya jelas: pelatihan tidak

memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Jadi jalan terbaik bagi mereka adalah kembali ke jalanan untuk mencari nafkah.

Kedua, coaching adalah strategi unik dari sebuah sistem inovasi dan perubahan. Adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palembang tidak merubah apapun bagi anak jalanan yang tidak memanfaatkan pelatihan tersebut untuk merubah pola pikirnya ke arah yang lebih baik. Mereka akan terus turun ke jalan untuk mendukung perekonomian. Fakta nyata bahwa mereka tidak memperoleh apa-apa dapat mengubah situasi mereka.

Ketiga, pembinaan merupakan pernyataan normatif yang menjelaskan bagaimana merencanakan dan melaksanakan perubahan dan reformasi. Ketika, setelah pelatihan, perencanaan masa depan tidak menjadi citra bagi anak jalanan, apalagi. Mereka masih harus mencari nafkah setiap hari, tetapi mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang baru untuk mendapatkan uang. Ketika ada hal baru yang bisa dilakukan, tentu anak jalanan tidak akan kembali ke jalanan.

Keempat, coaching berupaya efektif, efisien dalam sebuah perubahan dan inovasi yang tidak mengenal kapan harus berhenti. Jelas bahwa dukungan Dinas Sosial Kota Palembang tidak bisa datang dari efisiensi dan efektivitas karena masih banyak anak jalanan yang ditangkap setelah diawasi.

e. Solusi Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan Di Kota Palembang

Dinas Sosial Kota Palembang merupakan organisasi yang berperan penting dalam pembangunan daerah maupun dalam penanggulangan kemiskinan, melakukan pemberdayaan sosial dan pelayanan reintegrasi bagi masyarakat bermasalah pada perlindungan sosial (PMKS). Selain itu, Dinas Sosial Kota Palembang berfungsi sebagai pelaksana daerah di bidang sosial

untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah dan berupaya mengatasi masalah sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, bakti sosial kota Palembang juga melakukan kegiatan merawat anak jalanan. Namun selama pelaksanaan di lokasi, jika ada anak-anak yang berkeliaran, dibiarkan saja, artinya tidak harus ikut dengan pekerja untuk disambut. Selanjutnya karena anak jalanan masih tergolong anak-anak/remaja, tidak boleh dipaksakan. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dinas sosial dalam menyambut anak jalanan di kota Palembang dalam menghadapi situasi anak jalanan yang masih berada di jalanan adalah dengan mengajak masyarakat, merekomendasikan agar tidak pernah memberikan apapun atau uang kepada anak jalanan. , yang sering mendekati mereka di lampu merah.

Dengan tidak memberi mereka apa-apa atau uang, kami berharap anak-anak jalanan ini tidak lagi aktif di setiap persimpangan. Untuk melacak panggilan seperti ini membutuhkan kerjasama masyarakat yang baik. Jumlah anak jalanan yang meningkat di kota Palembang tidak hanya karena pengaruh perkembangan kota dengan banyaknya lampu lalu lintas di persimpangan jalan utama, tetapi juga karena kebiasaan masyarakat kita untuk selalu memberikan uang ke jalan. anak-anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi lapangan penulis, penulis menyimpulkan bahwa: Kegiatan bakti sosial dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan di kota Palembang dinilai kurang berhasil karena anak saya merantau selalu kembali ke jalanan. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menyambut anak jalanan adalah anak-anak berkeliaran kembali ke jalanan bahkan setelah mereka ditempatkan. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Dinas

Sosial adalah dengan melakukan propaganda yaitu mendorong masyarakat untuk tidak memberikan uang atau apapun kepada anak jalanan. Namun, ini tidak efektif dalam mencegah anak-anak berkeliaran kembali ke jalanan. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil analisis menggunakan indikator kinerja teoritis.

Berikut kesimpulan dari ketiga indikator teori kinerja tersebut: *Pertama*, Menyelenggarakan berbagai kegiatan dan menggerakkan pegawai organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi dan mobilisasi staf ditunjukkan dengan adanya tanggung jawab dalam pembagian tugas dan pelaksanaan tugas ketika staf memiliki tupoksi masing-masing untuk merawat anak-anak yang merantau di kota Palembang. Namun, pekerja sosial di kota Palembang tidak bisa menangani anak-anak yang berkeliaran kembali ke jalan, bahkan jika mereka didekati dan diberi makan. Oleh karena itu penulis berkesimpulan kurang berhasil.

Kedua, Mengelola karyawan organisasi secara efektif sehingga tujuan organisasi tercapai dengan efisiensi tinggi. Manajemen ditunjukkan dengan perencanaan sumber daya manusia, penilaian kinerja, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan untuk mencapai tujuan dengan efisiensi tinggi. Penulis menyimpulkan dengan cukup baik.

Ketiga, Menciptakan kondisi organisasi, sistem kompensasi dan hukuman untuk mendukung suasana kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ini diterjemahkan ke dalam hukuman bagi karyawan ketika mereka tidak disiplin dan insentif/promosi gaji jika karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, R. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pembinaan Dan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas*

Sosial Kota Palembang. Skripsi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Palembang

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieka Cipta

Doris Febriyanti dkk. (2017). *Peran Kepala Desa desa untuk meujudkan swadaya masyarakat dilihat dari pembangunan infra struktur desa studi pada kasus di Desa Cinta Damai kecamatan Sungai Lilin Musi Banyuasin*. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol 2, No. 1 Universitas Indo Global Mandiri

Harsinar, M. I. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Anak Jalanan Di Kota Makassar*. Jurnal Tomalebbi. Vol IV. No. 3.

Isabella dkk. (2020). *Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik: Vol 5, No. 1 Universitas Indo Global Mandiri.

Karakus. (2013). *International journal of scientific & technology research volume 2. International journal of scientific & technology research volume 2*, 227.

Lawler dan Porter. (1967). *Teori Kinerja*. Journal of Bussines Studies Vol I, No. 2

M. Ramadhani, d. (2016). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol 6, No. 11 Universitas Lambung Mangkurat.

Rezkie Raisa Dora. (2018). *Analisis Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Meningkatkan Kualitas*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Vol 2, No. 1 Universitas Jambi

Sanny Nofrima dkk. (2021). *Viewing Omnibus Law's Policy in a Government Ethics Perspective through Social Media*

Twitter. Jurnal Public Policy: Vol 7, No. 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadia Media.